

ABSTRACT

Persons with disabilities are those who have special needs and treatment compared to non-disabled people. What often happens, people with disabilities are considered as a people with no capabilities compared to non-disabled people. There are many assumptions that make persons with disabilities often experience discrimination in various fields of life. Although there are laws and regulations that focus on fulfilling the rights of persons with disabilities, until now the impact of these regulations has not been fully enjoyed by persons with disabilities. This research focuses on looking at effort to fulfil the right of persons with disabilities in the job training field in Special Region of Yogyakarta.

This study aims to see how the implementation of the policy of providing job training can encourage the interest of persons with disabilities to work and increase the absorption of disabilities workers in the Special Region of Yogyakarta. So far, in the implementation of granting the rights of persons with disabilities in the field of labor, it has not been able to run optimally even though it has been explained that persons with disabilities are also given the opportunity to get job training as an effort to provide working skills for persons with disabilities so that later they can be ready and absorbed to work.

This qualitative descriptive study took place in the Special Region of Yogyakarta as the first region to issue a Regional Regulation (Perda) regarding the fulfillment of the rights of persons with disabilities. Researcher collected data through observations and interviews with the DIY Disnakertrans, the Disability Committee and other related secondary data. The findings of this study are that the implementation of job training has not been able to significantly increase the number of disabled workers because there is a mismatch between job demand and the lack of job training implementation.

The perspective of social problems according to (Soetomo, 2017: 127) sees that social problems are relative, depending on the interpretation of a particular society or depending on how society gives meaning to the situation. The social problem of giving labeling to persons with disabilities is an obstacle for persons with disabilities to improve their welfare. The success rate of job training as an effort to increase the workforce with disabilities is also supported by the content of the policy and the implementation environment according to Grindle (1993: 65). The content of the policy to provide disability job training as an effort to increase the ability of persons with disabilities has not been supported by the implementation environment, this environment includes actors involved in job training programs as well as from job providers.

Keywords: Right of Person with Disabilities, Capabilities, Social Problems, Labor

INTISARI

Penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki kebutuhan dan treatment khusus dibandingkan non disabilitas. Hal yang sering terjadi, penyandang disabilitas sering dianggap tidak memiliki kapabilitas seperti non disabilitas. Banyak anggapan yang membuat para penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Meski sudah ada undang-undang dan peraturan yang memberikan fokus untuk pemenuhan hak para penyandang disabilitas, namun hingga saat ini dampak dari adanya peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus untuk melihat upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelatihan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian pelatihan kerja dapat mendorong minat dari para penyandang disabilitas untuk bekerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejauh ini, dalam pelaksanaan pemberian hak penyandang disabilitas dalam bidang tenaga kerja masih belum dapat berjalan secara maksimal meski sudah dijelaskan bahwa para penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja sebagai upaya untuk memberikan ketrampilan kerja untuk penyandang disabilitas agar nantinya dapat siap dan diserap menjadi tenaga kerja.

Penelitian deskriptif kualitatif ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah pertama yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara kepada pihak Disnakertrans DIY, Komite Disabilitas dan data-data sekunder lain yang terkait. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan kerja hingga saat ini belum dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja disabilitas secara signifikan karena ada ketidaksesuaian antara permintaan kerja dan minimnya pelaksanaan pelatihan kerja.

Perspektif masalah sosial menurut (Soetomo, 2017: 127) melihat bahwa masalah sosial bersifat relatif, tergantung dari interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung bagaimana masyarakat memberi makna terhadap situasi tersebut. Masalah sosial pemberian *labelling* pada penyandang disabilitas menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tingkat keberhasilan pelatihan kerja sebagai upaya peningkatan tenaga kerja disabilitas juga didukung oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasinya menurut Grindle (1993:65). Isi kebijakan untuk memberikan pelatihan kerja disabilitas sebagai upaya peningkatan kemampuan penyandang disabilitas belum dapat didukung oleh lingkungan implementasinya, lingkungan ini termasuk para aktor yang terlibat dalam program pelatihan kerja maupun dari para penyedia lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Hak Penyandang Disabilitas, Kapabilitas, Masalah Sosial, Tenaga Kerja